

1-2023

Dana Desa dan Perkembangan Status Desa: Studi Kasus Kabupaten/Kota di Indonesia

Yore Isti Tosan Aji

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, ajiexercine@gmail.com

Riatu Mariatul Qibthiyah

Program Pascasarjana Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, pcrmqx@gmail.com

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jepi>



Part of the [Regional Economics Commons](#)

Recommended Citation

Aji, Yore Isti Tosan and Qibthiyah, Riatu Mariatul (2023) "Dana Desa dan Perkembangan Status Desa: Studi Kasus Kabupaten/Kota di Indonesia," *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*: Vol. 23: No. 1, Article 3.

DOI: 10.21002/jepi.2023.03

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jepi/vol23/iss1/3>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Economics & Business at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia by an authorized editor of UI Scholars Hub.

Dana Desa dan Perkembangan Status Desa: Studi Kasus Kabupaten/Kota di Indonesia

Village Fund and Development of Village Status: A Case Study of District/Municipality in Indonesia

Yore Isti Tosan Aji^{a,*}, & Riatu Mariatul Qibthiyyah^b

^aBadan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

^bProgram Pascasarjana Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia

[diterima: 20 Januari 2021 — disetujui: 22 Oktober 2021 — terbit daring: 30 Maret 2023]

Abstract

Village development and improving village status are among the main agendas of the Indonesian Government. Village fund maybe have an important role, however, empirical studies on village funds and village status are still limited. This study aims to prove impact of the village fund on the development of village status according to the Village Development Index in Indonesia. Using First Difference method between 2014 and 2018, we found that village funds had a partially significant impact on the development of village status. Although statistically significant, the regression coefficient shows a small economic impact.

Keywords: *village fund; Village Development Index; village status*

Abstrak

Pembangunan desa dan peningkatan status desa merupakan salah satu agenda utama Pemerintah Indonesia. Dana desa dianggap berperan penting dalam peningkatan tersebut, akan tetapi studi empiris tentang dana desa dan status desa masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris dampak dana desa terhadap perkembangan status desa sesuai Indeks Pembangunan Desa (IPD) per kabupaten/kota di Indonesia. Melalui penggunaan metode *First Difference* dengan data tahun 2014 dan 2018, penulis menemukan bahwa dana desa berdampak secara parsial signifikan terhadap perkembangan status desa. Meskipun signifikan secara statistik, besaran koefisien regresi menunjukkan dampak yang kecil secara ekonomi.

Kata kunci: dana desa; Indeks Pembangunan Desa; status desa

Kode Klasifikasi JEL: O18; R11; R58

Pendahuluan

Pada saat Pemilu Presiden 2014, pasangan Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) saat itu, Joko Widodo dan Jusuf Kalla, mengusung visi misi agenda pemerintahan yang dikenal dengan nama Nawa Cita. Salah satunya berhubungan dengan pembangunan daerah dan desa, yakni Nawa Cita ketiga, yaitu membangun

Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam suatu kerangka negara kesatuan. Desa mendapatkan penguatan kewenangan melalui terbitnya Undang-Undang (UU) Desa (UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa). Selain itu, desa juga mendapatkan sumber pendapatan bukan hanya berasal dari desa itu sendiri.

Berdasarkan hasil kajian Tim Kajian Pusat Kebijakan APBN (2017) dan data Badan Pusat Statistik (BPS), rata-rata per desa diperkirakan telah memperoleh pendapatan lebih dari Rp1 miliar, yaitu se-

*Alamat Korespondensi: Jalan Pramuka No. 33, Jakarta Timur 13120. E-mail: ajiexercine@gmail.com.

besar Rp1,18 miliar pada tahun 2016 dan tahun 2017 mencapai Rp1,33 miliar. Pendapatan desa tersebut berasal dari tiga sumber pendapatan desa terbesar (Dana Desa, Alokasi Dana Desa, serta Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah) dan ditambah dengan Pendapatan Asli Desa. Sementara untuk dana desa, sejak digulirkan tahun 2015 hingga Agustus 2019, distribusinya selalu meningkat hingga mencapai Rp219,05 triliun (Kementerian Keuangan, 2019).

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dana desa dari tahun 2015 hingga 2017, dana desa mampu menghasilkan *output* sarana maupun prasarana yang berguna bagi penduduk desa. *Output* sarana dan prasarana sebagaimana tersaji dalam *Buku Saku Dana Desa* terbitan Kementerian Keuangan RI adalah terdiri atas terbangunnya lebih dari 95.200 kilometer jalan desa, 914.000 meter jembatan, 1.338 unit embung desa, 22.616 unit sambungan air bersih, 2.201 unit tambatan perahu, 10.964 unit Posyandu, 4.004 unit Pondok Bersalin Desa (Polindes), 3.106 pasar desa, 14.957 unit Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) desa, 19.485 unit sumur, serta 103.405 unit drainase dan irigasi.

Sementara dari sisi *outcome*, ternyata dana desa telah sukses meningkatkan kualitas hidup penduduk masyarakat desa. Peningkatan tersebut dapat terlihat di antaranya dari penurunan rasio ketimpangan (rasio Gini) pada perdesaan dari sebesar 0,34 (kondisi pada tahun 2014) menjadi sebesar 0,32 (kondisi pada tahun 2017). Hal ini menggambarkan adanya peningkatan pemerataan pendapatan di kawasan perdesaan. Selain itu, juga terlihat dari adanya jumlah penduduk miskin di perdesaan yang mengalami penurunan dari 17,7 juta (kondisi di tahun 2014) menjadi 17,1 juta (kondisi di tahun 2017) serta persentase penduduk miskin di perdesaan yang mengalami penurunan dari 14,09% (kondisi di tahun 2015) hingga menjadi 13,93% (kondisi di tahun 2017). Batas garis kemiskinan mengalami kenaikan dari Rp286,1 ribu pada tahun 2014 menjadi Rp361,5 ribu pada tahun 2017. Pencapaian tersebut

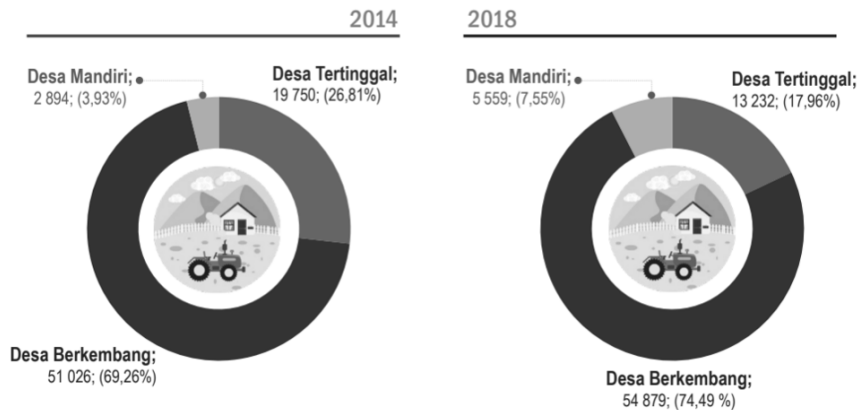
nampaknya akan mengalami peningkatan lagi pada beberapa tahun mendatang apabila dana desa dapat dikelola dengan baik.

Salah satu usaha pemerintah pusat dalam rangka melaksanakan amanat UU Desa yang utamanya berhubungan dengan perencanaan pembangunan maupun alat *monitoring* adalah mengukur tingkat perkembangan desa. Bentuk upaya pengukuran tersebut adalah melalui perumusan Indeks Pembangunan Desa (IPD). Dalam jangka waktu lima tahun ke depan, terdapat beberapa sasaran pembangunan desa yang harus dicapai, salah satu di antaranya adalah pengurangan jumlah desa tertinggal hingga 5.000 desa dan peningkatan jumlah desa mandiri paling tidak 2.000 desa pada tahun 2019.

Pengukuran pembangunan desa melalui IPD hingga saat ini telah dua kali dilaksanakan, yakni guna kepentingan tahap perencanaan dan juga tahap evaluasi. Pengukuran di tahap perencanaan dilakukan di tahun 2015 dengan cara mengukur desa-desa yang sudah terdaftar di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 39 tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dengan menggunakan sumber data dari Potensi Desa (Podes) tahun 2014. Pada tahap evaluasi, IPD dihitung kembali di tahun 2018. Data maupun daftar data desa hasil pendataan Podes tahun 2018 dipergunakan sebagai dasar bagi penghitungan IPD untuk tahun 2018.

Hasil pendataan *Podes 2018* terbitan BPS menginformasikan adanya 73.670 desa yang dapat dilihat perkembangan dan diperbandingkan secara panel antara tahun 2014 dan 2018. Penyamaan desa antara tahun 2014 dengan 2018 dilakukan guna mengetahui perkembangan pembangunan desa di antara kedua tahun tersebut. Hasilnya menunjukkan ada pengurangan desa tertinggal sejumlah 6.518 desa dan penambahan desa mandiri sejumlah 2.665 desa seperti tersaji pada Gambar 1.

Kemudian, untuk lima dimensi penyusun IPD menunjukkan adanya perkembangan dengan ca-



Gambar 1. Perkembangan Pembangunan Desa Menurut Status IPD 2014 dan 2018
Sumber: BPS (2018a)

paian yang berbeda. Dimensi penyelenggaraan pemerintahan desa mengalami kenaikan paling tinggi di antara dimensi IPD yang lainnya dengan nilai mencapai 9,81 poin. Sementara dimensi pelayanan dasar menjadi dimensi yang kenaikannya paling kecil dengan nilai 0,92 poin. IPD secara keseluruhan naik 3,65 poin. Meski kenaikan maksimal untuk kelima dimensi masih di bawah 10 poin, hal ini tetap menunjukkan adanya perkembangan antara kedua periode tahun 2014 dengan 2018.

Dana desa yang telah disalurkan oleh pemerintah mulai tahun 2015 sampai dengan saat ini dianggap telah berhasil meningkatkan *output* maupun *outcome* di tingkat desa. Sementara dari sisi dampak dana desa terhadap kemandirian desa, baru dilakukan terhadap 4.345 desa sebagai sampel yang disurvei. Kemudian berdasarkan Status IPD ternyata terdapat hasil yang positif dengan jumlah desa tertinggal mengalami pengurangan sebesar 6.518 desa dan desa mandiri mengalami penambahan sebesar 2.665 desa. Namun begitu, masih sedikit penelitian yang penulis temukan membahas tentang dampak dana desa terhadap perkembangan status desa di Indonesia. Beberapa penelitian terdahulu tentang pengaruh dana desa terhadap indeks perkembangan desa, baik Indeks Desa Mem-

bangun (IDM) maupun IPD masih memiliki beberapa keterbatasan (Kuncoro *et al.*, 2019; Maulana & Suryaningrum, 2019; Shalsabellah, 2020; Yulitasari & Tyas, 2020). Keterbatasan tersebut dari sisi jumlah sampel yang bersifat lokal (paling tinggi pada level satu provinsi) dan minimnya variabel kontrol yang dipergunakan dalam penelitian. Penulis tertarik untuk mengetahui apakah terdapat dampak dana desa terhadap perkembangan desa di Indonesia dari sisi kenaikan tingkat status desa dari desa tertinggal menjadi desa berkembang atau menjadi desa mandiri, dan dari desa berkembang naik status menjadi desa mandiri. Penelitian ini akan menjawab dampak dana desa terhadap perkembangan status desa per kabupaten/kota di Indonesia.

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis dan memberikan bukti empiris dampak dana desa terhadap perkembangan status desa per kabupaten/kota di Indonesia. Hipotesis utamanya adalah dana desa akan berdampak positif terhadap perkembangan status desa. Perkembangan tersebut ditinjau dari kenaikan tingkat status desa yang dapat dianalogikan dengan penurunan jumlah desa tertinggal, kenaikan jumlah desa berkembang, atau kenaikan jumlah desa mandiri antarperiode penelitian.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam tiga aspek. Kontribusi pertama berupa pembuktian secara empiris dampak dana desa terhadap perkembangan status desa per kabupaten/kota di Indonesia. Kemudian, sepanjang pengetahuan penulis, masih sedikit penelitian yang mengangkat tema dana desa dan indeks perkembangan desa dengan keterbatasan sampel dan variabel bebas yang dipergunakan. Kontribusi kedua dari studi ini adalah dapat melengkapi studi-studi yang sudah ada sebelumnya. Ketiga, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam mendorong pengelolaan dana desa yang lebih baik dan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan atau kebijakan dalam mengalokasikan dana desa secara tepat dengan memperhatikan status desa di Indonesia.

Metode analisis yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah regresi dengan *Pooled Cross Sections* (PCS) menggunakan *Ordinary Least Squares* (OLS) memakai metode *First Difference*, dengan efek tetap tambahan berupa *dummy* Pulau-Tahun. PCS bisa sangat berguna untuk mengevaluasi dampak dari peristiwa atau kebijakan tertentu. Penggabungan dua kelompok data *cross-sectional* yang dikumpulkan sebelum dan setelah terjadinya suatu peristiwa/kebijakan dapat digunakan untuk menentukan efeknya secara ekonomi pada *output* atau *outcome* tertentu (Wooldridge, 2016).

Penelitian ini menggunakan data panel sederhana dengan menggunakan variabel terikat berupa jumlah desa berdasarkan status desa per kabupaten/kota untuk tahun 2014 dan 2018 dan variabel utama berupa dana desa. Periode waktu yang diambil dari dua periode waktu berbeda tersebut untuk menangkap perbedaan kondisi sehubungan digulirkannya dana desa mulai tahun 2015. Periode tahun 2014 dipilih untuk menangkap kondisi sebelum dana desa digulirkan oleh pemerintah, sedangkan periode 2018 adalah periode setelah dana desa digulirkan oleh pemerintah.

Pengujian empiris menghasilkan temuan bahwa dana desa berdampak secara parsial signifikan pada tingkat $\alpha=1\%$ dengan perkembangan status desa. Kenaikan dana desa akan mengakibatkan penurunan jumlah desa tertinggal, penambahan jumlah desa berkembang, atau penambahan jumlah desa mandiri. Pengguliran dana desa diprediksi secara signifikan dapat menurunkan 13,03 desa tertinggal dan meningkatkan 17,79 desa berkembang. Meskipun terdapat pengaruh yang signifikan secara statistik, *magnitude* besaran koefisien regresi memiliki dampak yang kecil secara ekonomi.

Desa

Desa sebagaimana dijelaskan dalam UU Nomor 6 tahun 2014, terdiri atas desa, desa adat, nagari ataupun yang disebut dengan nama lainnya, merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. Istilah desa secara etimologi berasal dari Bahasa Sansekerta, yakni *deca* yang diartikan sebagai tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran (Kartohadikoesoemo, 1984).

Koentjaraningrat (2009) memberikan penjelasan tentang definisi desa sebagai sebuah masyarakat yang mempunyai hubungan keterikatan yang mempersatukan dan berlandaskan atas institusi yang bersifat informal. Masyarakat di desa sebagian besar terikat atas suatu hubungan kekerabatan. Setiap individu dalam kelompok masyarakat saat melaksanakan suatu kegiatan melakukan pembagian kerja yang masih bersifat informal, fleksibel, dan juga sangat sederhana. Sementara Kartohadikoesoemo (1984), mendefinisikan desa sebagai suatu kesatuan hukum, di mana suatu masyarakat bertempat tinggal di dalamnya dan memiliki kuasa untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri. Kamus

Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan desa sebagai suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga, memiliki sistem pemerintahan sendiri dan dikepalai oleh seorang kepala desa. Selain itu, desa juga dapat diartikan sebagai kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan.

Desa memiliki karakteristik perekonomian yang cukup unik. Menurut Todaro & Smith (2006), perekonomian desa secara umum adalah perekonomian yang menitikberatkan atau bergantung pada sektor pertanian dengan beberapa ciri:

1. Secara umum memiliki sifat monokultural, yakni melakukan aktivitas bercocok tanam hanya pada satu jenis komoditas pertanian;
2. Memiliki skala usaha yang sangat kecil yang berakibat pada kecukupan jumlah produksi produk pertanian hanya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari;
3. Pengelolaan lahan masih dilakukan dengan cara tradisional sehingga mengakibatkan pada rendahnya tingkat produktivitas;
4. Hasil produk-produk pertanian mempunyai nilai tambah yang sangat kecil. Produk pertanian hanya dimanfaatkan sebagai bahan pangan utama atau dijual sebagai bahan baku untuk kemudian diolah kembali dalam industri pengolahan;
5. Tenaga kerja perempuan memiliki andil atau peranan cukup besar dalam mengelola lahan pertanian, misalnya ikut serta membantu aktivitas suami atau ayah petani di sawah, mulai saat penanaman padi hingga musim panen tiba.

Perekonomian desa sebenarnya memiliki potensi yang besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan perekonomian nasional. Terdapat sebuah teori yang memberikan penjelasan proses pembangunan yang ada di perkotaan dan pedesaan, pola investasi, urbanisasi, dan sistem penetapan upah di sektor modern. Teori ini dipaparkan oleh Arthur Lewis (2015) yang dikenal dengan nama teori dua sektor dan menjadi sebuah teori umum yang menjelaskan proses pembangunan yang ada di negara-

negara berkembang. Lewis membagi perekonomian negara ke dalam dua sektor perekonomian yang cukup bertolak belakang, yaitu sektor tradisional dan modern.

Sektor tradisional secara umum terdapat di daerah pedesaan, memiliki karakteristik berupa tingkat produktivitas yang masih rendah dan adanya surplus tenaga kerja yang disebabkan karena kelebihan jumlah penduduk (*overpopulation*). Hal ini berakibat pada produktivitas marjinal tenaga kerja menjadi nol dan skala usaha terbatas untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri (Jhingan, 2013). Sementara sektor modern secara umum terdapat di wilayah perkotaan dan menitikberatkan pada sektor industri, dengan karakteristik tingkat produktivitas yang tinggi dari input yang dipergunakan dalam proses produksi. Kondisi perekonomian desa yang memiliki surplus tenaga kerja menurut Lewis dapat digunakan sebagai pemasok tenaga kerja untuk sektor modern yang efisien dengan industri-industri berskala besar dan pemanfaatan teknologi tinggi di wilayah perkotaan. Kondisi yang dicapai akan lebih baik saat terjadi pemindahan surplus tenaga kerja tersebut, karena akan ada perbaikan atau peningkatan produktivitas dari tenaga kerja yang ada di sektor tradisional (Todaro & Smith, 2006).

Dana Desa

Dana desa adalah transfer ke daerah dan merupakan salah satu bentuk dari desentralisasi fiskal di Indonesia. Perkembangan sistem desentralisasi di Indonesia sudah mulai digulirkan sejak zaman penjajahan Belanda melalui penerbitan UU Desentralisasi yang dikenal dengan nama *Decentralisatie Wet 1903* (Hestiliani, 2019). Dua tahun kemudian, dalam rangka pelaksanaan *Decentralisatie Wet 1903*, Pemerintah Belanda mengeluarkan *Decentralisatie Besluit 1905* dan *Local Raden Ordonnantie* No. 181 tahun 1905. Sejak saat itu, Indonesia mulai mengenal istilah desentralisasi meski belum dapat diterapkan sepenuhnya dan terus mengalami perkembangan

pada era berikutnya.

Rosen & Gayer (2014) menyatakan bahwa bantuan (*grants*) dari satu tingkat pemerintahan ke tingkat lainnya adalah metode utama untuk mengubah sumber daya fiskal dalam sistem federal. Struktur bantuan tersebut dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pada dasarnya, menurut Rosen & Gayer (2014), terdapat dua jenis bantuan yang terdiri dari *conditional* dan *unconditional grants*. *Conditional grants* yang terkadang disebut juga sebagai *categorical grants* merupakan bantuan yang mana pemberi bantuan menentukan sampai batas tertentu dan tujuan penerima dapat menggunakan dana tersebut. Beberapa tipe *conditional grants* yaitu *matching grants*, *closed-ended matching grants*, dan *nonmatching grants*.

Dana desa sebenarnya lebih diprioritaskan guna kepentingan pembangunan desa (Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Oleh karena itu, dana desa dapat diklasifikasikan sebagai *matching grants* jika merujuk pada klasifikasi jenis bantuan berdasarkan penjelasan Rosen & Gayer (2014). Kartohadikoesoemo (1984) menjelaskan bahwa dana desa telah dikenal di Indonesia sejak masa penjajahan Belanda yang ditandai dengan adanya Kas Desa. Istilah kas desa muncul sejak 1906 saat penerapan *Inlandsche Gemeente Ordonnantie* dan penyusunan kas desa dimaksudkan untuk membiayai pembelanjaan rumah tangga desa.

Dana desa saat ini telah jauh berkembang dan menjadi bagian dari sistem pengelolaan keuangan negara dengan mekanisme penyerahan urusan pemerintahan kepada desa secara mandiri. Peraturan yang menjadi landasan bagi dana desa telah dijabarkan secara lengkap dalam UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan PP Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana desa merupakan anggaran yang diperuntukkan bagi de-

sa dan desa adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan dialokasikan kepada setiap desa secara merata dan berkeadilan (Kementerian Keuangan, 2017b).

Formulasi dana desa setiap tahun dari 2015 hingga 2020 selalu mengalami perkembangan. Tabel 1 merupakan tabel yang menyajikan perubahan terkait formula pembagian dana desa.

Tabel 1. Perkembangan Formula Pembagian Dana Desa Tahun 2015–2020

Proporsi Alokasi	2015–2017	2018	2019	2020
Alokasi Dasar	90%	77%	72%	69%
Alokasi Formula	10%	20%	25%	28%
Alokasi Afirmasi	-	3%	3%	1,5%
Alokasi Kinerja	-	-	-	1,5%

Sumber: Kementerian Keuangan (2017a), diolah

Berdasarkan formula pembagian dana desa pada Tabel 1, terdapat penurunan untuk proporsi Alokasi Dasar (porsi yang dibagi rata). Kemudian, ada peningkatan untuk Alokasi Formula (porsi berdasarkan formula yang terdiri atas jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa). Pertimbangan perubahan formula tersebut karena implikasi dana desa dalam rentang 2015–2017 belum sepenuhnya mencerminkan keadilan, belum berpihak pada desa tertinggal dan sangat tertinggal, serta belum fokus pada upaya pengentasan kemiskinan. Sejak 2018, ada tambahan Alokasi Afirmasi untuk desa tertinggal dan sangat tertinggal sehingga memperoleh alokasi anggaran yang lebih besar dan diharapkan dapat mengejar ketertinggalan dibandingkan dengan desa yang lebih maju. Implikasi dari reformulasi tersebut adalah rasio ketimpangan distribusi dana desa mengalami penurunan, alokasi dana desa di desa tertinggal dan sangat tertinggal dengan jumlah penduduk miskin tinggi menjadi lebih besar, serta alokasi dana desa per kapita di desa tertinggal dan sangat tertinggal di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan lebih besar dibandingkan dengan di daerah lainnya (Kementerian Keuangan,

2017b).

Indeks Pembangunan Desa (IPD)

Pemerintah telah menyusun dokumen strategis berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode tahun 2015–2019 yang memuat tentang rencana pembangunan dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Dokumen RPJMN tersebut menjadi acuan resmi, baik bagi pemerintah daerah maupun pihak yang berkepentingan lainnya dalam mewujudkan pembangunan. Sementara itu, sasaran spesifik pembangunan desa harus dituntaskan oleh pemerintah dalam periode waktu 5 tahun adalah pengurangan desa tertinggal hingga sejumlah 5.000 desa serta peningkatan jumlah desa mandiri paling tidak 2.000 desa pada tahun 2019. Dalam rangka menilai tingkat perkembangan atau kemajuan desa di Indonesia, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan BPS, menyusun Indeks Pembangunan Desa (IPD).

Penyusunan IPD dimaksudkan untuk menyajikan gambaran tingkat kemajuan dan progres pembangunan desa yang ada di Indonesia pada suatu waktu. Sistem pengukuran yang disebut IPD tersebut dikembangkan oleh Bappenas bekerja sama dengan BPS (Bappenas, 2015). *Output* penyusunan IPD tersebut adalah pemetaan desa–desa menurut tingkat perkembangan desa, yakni desa terbagi atas tiga kategori yaitu: desa tertinggal, desa berkembang, dan desa mandiri untuk seluruh provinsi di Indonesia. Selain itu, *output* penyusunan IPD juga berupa informasi untuk setiap dimensi penyusun IPD, variabel-variabel, maupun indikator penyusunnya. Gambar 2 menyajikan informasi tentang dimensi dan variabel IPD, sedangkan kontribusi setiap indikator penyusun IPD tersaji dalam Tabel 2.

IPD disusun guna memberikan penilaian tingkat perkembangan maupun tingkat kemajuan desa di Indonesia. IPD yang baik ditandai dengan adanya

peningkatan nilai dalam kelima dimensi pembentuk IPD, yaitu peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat, peningkatan kondisi infrastruktur, transportasi/ aksesibilitas yang makin membaik, peningkatan pelayanan umum, dan peningkatan pelayanan pemerintahan. IPD merupakan sebuah indeks komposit tertimbang dari 42 indikator penyusunnya, secara substansi bersama-sama disusun dalam rangka memberikan gambaran tingkat perkembangan atau kemajuan desa. Besaran kontribusi masing-masing indikator penyusun IPD berbeda-beda dan menunjukkan tingkat pengaruh indikator dalam penyusunan nilai/skor IPD (Kementerian PPN/Bappenas & BPS, 2015). Persamaan di bawah ini merupakan rumus yang dipergunakan dalam menentukan nilai IPD:

$$IPD = (b_1 * V_1 + b_2 * V_2 + b_3 * V_3 + \dots + b_{42} * V_{42}) * 20 \quad (1)$$

dengan *IPD* adalah nilai IPD setiap desa, b_1 sampai dengan b_{42} adalah penimbang/pembobot ke-1 sampai dengan ke-42, dan V_1 sampai dengan V_{42} adalah skor indikator ke-1 sampai dengan ke-42. Total nilai penimbang/pembobot adalah 1, kemudian nilai maksimal skor setiap indikator adalah 5 sehingga untuk menentukan nilai IPD yang maksimalnya bernilai 100 perlu dikalikan 20.

Besarnya IPD nantinya akan menggunakan skala dari nilai 0 sampai dengan 100. Dalam rangka mempermudah pemahaman dan interpretasi, desa dikelompokkan menjadi tiga jenis kategori, yakni desa tertinggal, desa berkembang, maupun desa mandiri. Desa tertinggal ditandai dengan desa yang memiliki akses dan ketersediaan terhadap pelayanan dasar, infrastruktur desa, transportasi/aksesibilitas, pelayanan umum, maupun penyelenggaraan pemerintahan yang keseluruhannya masih terbilang minim. Desa tertinggal merupakan desa yang secara teknis mempunyai nilai IPD di bawah atau sama dengan 50. Desa berkembang merupakan desa yang memiliki akses dan ketersediaan terhadap pelayanan dasar, infrastruktur desa, transportasi/aksesibilitas,



Gambar 2. Dimensi dan Variabel Indeks Pembangunan Desa
Sumber: BPS (2018a)

pelayanan umum, dan juga penyelenggaraan pemerintahan yang telah cukup memadai. Desa berkembang adalah desa yang secara teknis mempunyai nilai IPD di atas 50 akan tetapi di bawah atau sama dengan 75. Kemudian terakhir, desa mandiri merupakan desa dengan akses dan ketersediaan terhadap pelayanan dasar yang sudah mencukupi, infrastruktur desa yang telah memadai, transportasi/aksesibilitas yang mudah, pelayanan umum sudah baik, dan juga penyelenggaraan pemerintahan desa yang memuaskan. Desa mandiri secara teknis adalah desa yang mempunyai nilai IPD di atas 75 (BPS, 2019a).

Sesuai dengan publikasi *Indeks Pembangunan Desa* tahun 2014 dan 2018 terbitan BPS, pengukuran IPD untuk kedua tahun tersebut menggunakan bobot dan elemen yang sama persis. Tidak terdapat perubahan pada besaran bobot dimensi, variabel, dan nama indikator penyusun IPD untuk tahun 2014 dan 2018. Oleh karena itu, harapannya efek yang ditangkap dalam regresi dapat dipastikan bukan karena perubahan pengukuran variabel bebas penelitian.

Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual yang diajukan dalam penelitian ini seperti terlihat pada Gambar 3. Berdasarkan diagram kerangka konseptual, dapat dijelaskan bahwa variabel dana desa serta variabel penjelas lainnya yang berupa komponen Pendapatan Desa (ADD, BHPRD, PADES, BANKEU) dan variabel penjelas sosial ekonomi (PDRB per kapita, jumlah penduduk, jumlah penduduk bekerja, deflator) dapat berpengaruh pada lima dimensi penyusun nilai IPD yang secara detail terdiri atas 42 indikator. Peningkatan variabel bebas dapat memengaruhi perubahan nilai IPD dan selanjutnya akan meningkatkan status desa dari desa tertinggal menjadi desa berkembang atau menjadi desa mandiri, dan dari desa berkembang naik status menjadi desa mandiri. Atau dapat juga diartikan, jumlah desa tertinggal mengalami penurunan dan desa berkembang atau desa mandiri mengalami kenaikan.

Penelitian Sebelumnya

Beberapa penelitian dipergunakan sebagai referensi dalam penelitian ini. Boonperm *et al.* (2013) adalah

Tabel 2. Indikator Penyusun IPD

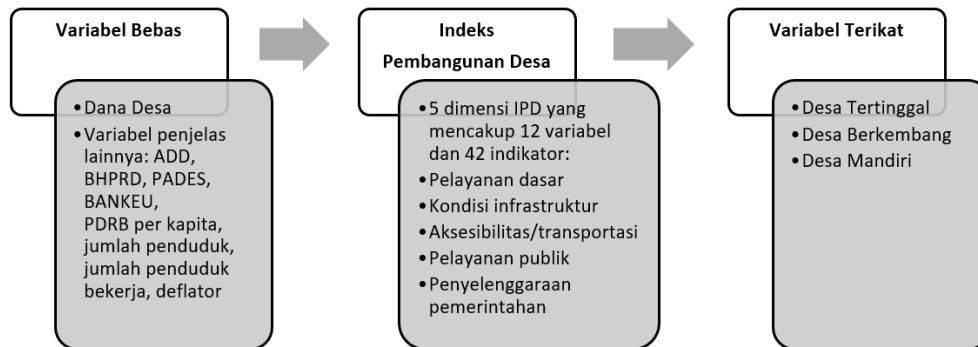
Dimensi	Variabel	Indikator				
		Deskripsi Indikator	Penimbang			
Pelayanan Dasar (0,326)	Pelayanan Pendidikan (0,098)	Ketersediaan dan akses ke TK/RA/BA	0,0227852			
		Ketersediaan dan akses ke SD sederajat	0,0115521			
		Ketersediaan dan akses ke SMP sederajat	0,0320783			
		Ketersediaan dan akses ke SMA sederajat	0,0317407			
	Pelayanan Kesehatan (0,228)	Pelayanan Kesehatan (0,228)	Ketersediaan dan kemudahan akses ke rumah sakit	0,0271630		
			Ketersediaan dan kemudahan akses ke rumah sakit bersalin	0,0258106		
			Ketersediaan dan kemudahan akses ke Puskesmas	0,0310473		
			Ketersediaan dan kemudahan akses ke Poliklinik/Balai Pengobatan	0,0308963		
			Ketersediaan dan kemudahan akses ke tempat praktek dokter	0,0325841		
			Ketersediaan dan kemudahan akses ke tempat praktek bidan	0,0299338		
			Ketersediaan dan kemudahan akses ke Poskesdes atau Polindes	0,0252111		
			Ketersediaan dan kemudahan akses ke Apotek	0,0253566		
			Kondisi Infrastruktur (0,252)	Infrastruktur Ekonomi (0,094)	Ketersediaan pertokoan, minimarket atau toko kelontong	0,0196165
					Ketersediaan pasar	0,0179773
Ketersediaan restoran, rumah makan atau warung/kedai makan	0,0152138					
Ketersediaan akomodasi hotel atau penginapan	0,0186228					
Infrastruktur Energi (0,051)	Ketersediaan bank	0,0229853				
	Elektrifikasi	0,0140417				
Infrastruktur Air Bersih dan Sanitasi (0,074)	Infrastruktur Air Bersih dan Sanitasi (0,074)	Kondisi penerangan di jalan utama		0,0188277		
		Bahan bakar untuk memasak		0,0177782		
		Sumber air untuk minum		0,0299481		
		Sumber air untuk mandi/cuci		0,0301380		
Infrastruktur Komunikasi dan Informasi (0,033)	Infrastruktur Komunikasi dan Informasi (0,033)	Fasilitas buang air besar	0,0137127			
		Ketersediaan dan kualitas fasilitas komunikasi seluler	0,0160403			
Aksesibilitas/ Transportasi (0,204)	Sarana Transportasi (0,117)	Ketersediaan fasilitas internet dan pengiriman pos atau barang	0,0172964			
		Lalu lintas dan kualitas jalan	0,0174274			
		Aksesibilitas jalan	0,0149853			
	Aksesibilitas Transportasi (0,086)	Aksesibilitas Transportasi (0,086)	Ketersediaan angkutan umum	0,0426582		
			Operasional angkutan umum	0,0422595		
			Waktu tempuh per kilometer transportasi ke Kantor Camat	0,0177129		
Pelayanan Umum (0,109)	Kesehatan Masyarakat (0,040)	Biaya per kilometer transportasi ke Kantor Camat	0,0280166			
		Waktu tempuh per kilometer transportasi ke Kantor Bupati/Walikota	0,0142172			
		Biaya per kilometer transportasi ke Kantor Bupati/Walikota	0,0264609			
Penyelenggaraan Pemerintahan (0,109)	Kemandirian (0,062)	Penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB)	0,0195116			
		Penanganan gizi buruk	0,0209339			
	Kualitas Sumber Daya Manusia (0,047)	Kualitas Sumber Daya Manusia (0,047)	Ketersediaan fasilitas olah raga	0,0334978		
			Keberadaan kelompok kegiatan olah raga	0,0351981		
Kemandirian (0,062)	Kemandirian (0,062)	Kelengkapan Pemerintahan Desa	0,0260184			
		Otonomi desa	0,0163094			
		Aset/kekayaan desa	0,0198562			
		Kualitas SDM Kepala Desa	0,0186415			
Kualitas SDM Sekretaris Desa	Kualitas SDM Sekretaris Desa	Kualitas SDM Sekretaris Desa	0,0279371			

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas & BPS (2015)

salah satu contoh penelitian yang mengangkat topik tentang penggunaan dana desa melalui program dana desa dan perkotaan pada tahun 2001. Program tersebut berhasil menyediakan modal kerja bagi asosiasi kredit bergilir yang dijalankan secara lokal. Kemudian, Azwardi & Sukanto (2014) menjelaskan tentang kebijakan dana desa yang jauh berbeda dengan kebijakan pemerintah yang terda-

hulu, perbedaan antara era sentralistik dengan masa reformasi, dan dilanjutkan dengan adanya otonomi daerah melalui lahirnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Beberapa hal yang menjadi perhatian terkait penelitian tentang dana desa sejak 2015 adalah tentang formulasi pembagian dana desa. Lewis (2015) melakukan penelitian tentang permasalahan pada for-



Gambar 3. Diagram Kerangka Konseptual

mulasi dana desa yang digunakan oleh Pemerintah Indonesia pada saat itu. Hasil penelitiannya adalah formulasi dana desa sudah mempertimbangkan heterogenitas dari setiap desa, yakni memperhitungkan kemampuan desa dalam mengumpulkan pendapatan. Selanjutnya, penelitian KOMPAK (Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan) (2017) menyatakan bahwa formula di dalam mengalokasikan dana desa untuk tahun 2016 ternyata menghasilkan distribusi dana yang timpang, baik untuk antardesa maupun antarkabupaten atau kota.

Dana desa dianggap dapat memberi manfaat positif dalam mengatasi masalah kemiskinan dan ketimpangan antardesa. Hasil kajian BKF Kementerian Keuangan RI (2017) menyatakan bahwa dana desa yang diimplementasikan telah mampu menurunkan angka kemiskinan dari 14,2% (tahun 2015) hingga menjadi 13,9% (tahun 2017). Dana desa memiliki pengaruh cukup signifikan terhadap kemiskinan jika ditilik dari banyaknya jumlah penelitian yang membahas mengenai hubungan kedua variabel tersebut (Kadafi & Sudrahman, 2018; Riyanto & Junaedi, 2017; Sari & Abdullah, 2017; Susilowati *et al.*, 2017). Sebagian besar peneliti menghasilkan simpulan bahwa dana desa berhubungan negatif dengan kemiskinan.

Beberapa penelitian terdahulu tentang penga-

ruh dana desa terhadap indeks perkembangan desa, baik IDM maupun IPD di antaranya adalah Kuncoro *et al.* (2019), Maulana & Suryaningrum (2019), Shalsabellah (2020), dan Yulitasari & Tyas (2020). Hasil penelitian Kuncoro *et al.* (2019) menyatakan bahwa Desa Balesari di Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah mendapatkan nilai IPD sebesar 48,72119 sehingga masih berstatus sebagai desa tertinggal. Selanjutnya, penelitian Maulana & Suryaningrum (2019) memperlihatkan adanya peningkatan signifikan pada IPD Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan antara kondisi sebelum dan setelah bergulirnya dana desa. Akan tetapi, angka kemiskinan pada kondisi setelah bergulirnya dana desa ternyata tidak mengalami penurunan yang signifikan apabila dibandingkan angka kemiskinan pada kondisi sebelum adanya dana desa. Hal itu sejalan dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Setiawan (2019) bahwa tidak ada cukup bukti guna menyatakan adanya perbedaan tingkat kemiskinan perdesaan menurut provinsi di Indonesia sebelum dan setelah adanya dana desa.

Dana desa dapat memberikan pengaruh yang berbeda pada peningkatan IDM dan IPD. Hasil penelitian Yulitasari & Tyas (2020) menunjukkan bahwa perubahan besaran dana desa tidak berpengaruh secara signifikan terhadap perubahan

status desa di Provinsi Jawa Tengah. Sementara Shalsabellah (2020) meneliti tentang dampak pengalokasian dana desa terhadap pencapaian kinerja IPD dengan objek studi Provinsi Jawa Barat. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dana desa berpengaruh dengan nilai sebesar 64,4% dalam peningkatan nilai IPD. Dampak positif pengalokasian dana desa terlihat dari pembangunan maupun kemajuan desa yang meningkat, baik yang sifatnya itu fisik maupun juga nonfisik pada setiap dimensi IPD.

Penelitian terkini tentang dana desa disajikan oleh Arifin *et al.* (2020) yang berusaha untuk memberikan bukti empiris mengenai dampak dana desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Indonesia dengan menggunakan data primer berupa survei sejumlah lebih dari seribu desa. Strategi metode estimasi yang dipergunakan adalah *first difference* dan *difference-in-difference*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dana desa lebih cenderung meningkatkan jumlah BUMDes dengan kecenderungan serupa antara wilayah Jawa dan non-Jawa. Namun, peningkatan pesat BUMDes tidak diikuti dengan pemanfaatan yang besar.

Berdasarkan beberapa literatur terdahulu yang membahas mengenai dana desa, masih sedikit penelitian yang membahas tentang dampak dana desa terhadap perkembangan status desa di Indonesia. Beberapa penelitian terdahulu yang membahas pengaruh dana desa terhadap indeks perkembangan desa, baik IDM maupun IPD masih memiliki beberapa keterbatasan. Keterbatasan tersebut dari sisi jumlah sampel yang bersifat lokal (paling tinggi pada level satu provinsi) dan minimnya variabel kontrol yang dipergunakan dalam penelitian. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengetahui dampak dana desa terhadap perkembangan status desa per kabupaten/kota di Indonesia.

Metode

Metode sederhana yang biasa digunakan untuk melakukan estimasi dalam penelitian adalah metode OLS. Namun begitu, penggunaan OLS di dalam penelitian ini akan menghasilkan isu bias/*endogeneity* berupa masalah variabel yang dihilangkan (*omitted variable*). Salah satu solusi yang mungkin dalam mengatasi bias adalah mencoba mengontrol lebih banyak faktor, meski banyak faktor mungkin sulit untuk dikendalikan. Selain itu, penggunaan data jumlah desa (tertinggal, berkembang, dan mandiri) sebelum munculnya kebijakan dana desa dapat membantu mengendalikan fakta bahwa kabupaten/kota yang berbeda akan memiliki jumlah desa (tertinggal, berkembang, dan mandiri) yang berbeda pula. Sebagaimana dicontohkan oleh Wooldridge (2016) atas pengaruh gangguan terhadap tingkat kriminalitas, penggunaan regresi sederhana untuk satu periode menghasilkan hubungan yang negatif dan tidak signifikan. Kemudian melalui penggabungan dua periode data *cross section* menghasilkan hubungan yang positif, tetapi tidak signifikan. Ketika menggunakan *first difference* dari dua periode data *cross section* baru menghasilkan hubungan yang positif dan signifikan, bahkan ada temuan menarik berupa peningkatan kriminalitas meskipun tidak ada penambahan pengangguran. Penggunaan metode *first difference* merupakan cara yang ampuh untuk mengontrol efek tetap tidak teramati yang tidak berubah antarperiode.

Metode analisis yang ideal untuk penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan seperti yang dilakukan oleh Arifin *et al.* (2020), yaitu memakai metode *first difference* dan *Difference-in-Difference* (DiD). Namun, kendala terbesar dalam studi dampak dana desa adalah tidak adanya *counterfactual* yang ideal. *Counterfactual* yang memungkinkan untuk dipergunakan adalah unit kelurahan dan Unit Permukiman Transmigrasi (UPT)/Satuan Permukiman Transmigrasi (SPT) yang setingkat dengan pemerintahan desa. Namun begitu, penilaian

IPD tidak dilakukan untuk level kelurahan dan UPT/SPT. Penulis juga belum pernah menjumpai adanya pengklasifikasian kelurahan dan UPT/SPT sebagaimana pengklasifikasian status desa menjadi desa tertinggal, desa berkembang, dan desa mandiri. Asumsi *parallel trend* sebagai syarat penggunaan metode DiD tidak dapat dipenuhi karena tidak ada kategori kelurahan atau UPT seperti pada desa sebagai variabel utama penelitian. Berdasarkan kondisi tersebut, metode analisis yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah dengan PCS menggunakan OLS memakai metode *first difference*, dengan efek tetap tambahan berupa *dummy* Pulau-Tahun.

Model estimasi dalam penelitian adalah sebagai berikut:

$$\Delta Y = \delta_0 + \beta_1 \Delta X + \beta_2 \Delta V + \Delta \varepsilon \quad (2)$$

dengan ΔY adalah perubahan variabel terikat (jumlah desa berdasarkan status desa per kabupaten/kota yang terdiri atas jumlah desa tertinggal, jumlah desa berkembang, dan juga jumlah desa mandiri; δ_0 adalah parameter koefisien intersep; β_1 dan β_2 adalah parameter koefisien regresi; ΔX adalah perubahan variabel utama penelitian (dana desa per kabupaten/kota); ΔV adalah perubahan variabel penjelas lainnya (variabel kontrol) berupa pendapatan desa yang diagregasi di level kabupaten/kota, seperti Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD), Pendapatan Asli Desa (PADES), dan Bantuan Keuangan (BANKEU) serta variabel penjelas sosial ekonomi di level kabupaten/kota, seperti PDRB per kapita, jumlah penduduk, jumlah penduduk bekerja, dan deflator PDRB; dan $\Delta \varepsilon$ adalah perubahan *error term*.

Persamaan (2) biasa disebut dengan *first-differenced equation* (Wooldridge, 2016). Selanjutnya, dari *first-differenced equation* tersebut akan dilakukan penambahan *dummy* Pulau-Tahun sebagai variabel kontrol dalam rangka mengatasi masalah variasi tidak teramati yang dijumpai pada dimensi Pulau-Tahun merujuk pada penelitian Kis-Katos & Sparrow

(2015). Model estimasi yang digunakan menjadi:

$$\Delta Y = \delta_0 + \beta_1 \Delta X + \beta_2 \Delta V + \lambda + \Delta \varepsilon \quad (3)$$

dengan λ merupakan *dummy* Pulau-Tahun sebagai efek tetap tambahan (*control*).

Dampak positif terhadap IPD dapat dihitung berdasarkan besarnya koefisien δ_0 . Apabila nilai koefisien δ_0 positif dan signifikan secara statistik, dapat disimpulkan bahwa ada dampak pengguliran dana desa terhadap perkembangan status desa. Sementara itu, nilai koefisien $\beta_1 > 0$ dapat menunjukkan dampak tambahan positif dari variabel dana desa terhadap perkembangan status desa.

Variabel terikat dalam penelitian ini menggunakan jumlah desa berdasarkan status desa, yang terdiri atas jumlah desa tertinggal, jumlah desa berkembang, dan juga jumlah desa mandiri. Penulis menggunakan jumlah desa dan bukan persentase desa guna mempermudah interpretasi dan pemahaman dalam membaca *output* hasil estimasi penelitian. Selain itu, mengingat periode yang digunakan adalah interval 4 tahun saja sehingga lebih relevan untuk penggunaan jumlah desa dibandingkan dengan persentase desa untuk menggambarkan variasi data.

Data yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari BPS, seperti *Statistik Potensi Desa (Podes) Indonesia* tahun 2014 dan 2018, *Indeks Pembangunan Desa* tahun 2014 dan 2018, dan *Statistik Keuangan Pemerintah Desa* tahun 2015 dan 2019. Kemudian untuk data variabel penjelas sosial ekonomi di level kabupaten/kota diperoleh dari BPS dan Knoema (2019). Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah desa yang diagregasi ke dalam level kabupaten/kota. Kondisi ideal dalam melakukan penelitian terkait dana desa adalah menggunakan unit analisis pada level desa. Namun, terdapat keterbatasan data yang diperoleh, yakni nilai realisasi dana desa per desa di Indonesia tidak didiseminasikan oleh BPS. Selain itu, cakupan data jumlah desa dan nilai dana desa sesuai *Indeks*

Pembangunan Desa tahun 2014 dan 2018 serta *Statistik Keuangan Pemerintah Desa* menyajikan informasi di level kabupaten/kota.

Jumlah kabupaten/kota sesuai *Indeks Pembangunan Desa 2014 dan 2018* masing-masing sebanyak 434 (Kementerian PPN/Bappenas & BPS, 2015; BPS, 2019). Kondisi untuk penentuan IPD 2018, terdapat tiga kabupaten baru, yaitu Buton Tengah dan Buton Selatan (pemekaran dari Kabupaten Buton), dan Muna Barat (pemekaran Kabupaten Muna). Dalam rangka mempermudah perhitungan dan menghindari kesalahan atau bias pemekaran wilayah dalam melakukan regresi, 5 kabupaten (2 kabupaten asal dan 3 kabupaten hasil pemekaran) dikeluarkan dari sampel penelitian. Oleh karena itu, jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini menjadi 429 kabupaten/kota untuk setiap tahun periode sehingga total observasi untuk 2 periode sebanyak 858 kabupaten/kota. Data keuangan pemerintah desa untuk tahun 2018 tidak tersedia untuk 13 kabupaten/kota karena tidak di-sampling oleh BPS. Data jumlah penduduk bekerja tidak tersedia untuk 18 daerah yang mengalami pemekaran (kondisi tahun 2014) dan 1 daerah, yaitu Lombok Utara (kondisi tahun 2018) karena adanya gempa bumi.

Hasil dan Analisis

Gambaran Umum Indeks Pembangunan Desa

Berdasarkan perhitungan IPD dari publikasi BPS, dapat diperoleh informasi bahwa nilai IPD yang tinggi didominasi oleh wilayah Jawa-Bali, Sulawesi, dan Sumatra. Nilai IPD untuk ketiga wilayah tersebut berada di atas rata-rata IPD nasional sebesar 55,71 (tahun 2014) dan 59,36 (tahun 2018). Perbandingan nilai IPD berdasarkan pulau seperti tersaji pada Gambar 4.

IPD yang tersusun dari lima dimensi secara umum mengalami kenaikan dari tahun 2014 ke

tahun 2018. Grafik perkembangan IPD menurut dimensi penyusunnya tersaji pada Gambar 5.

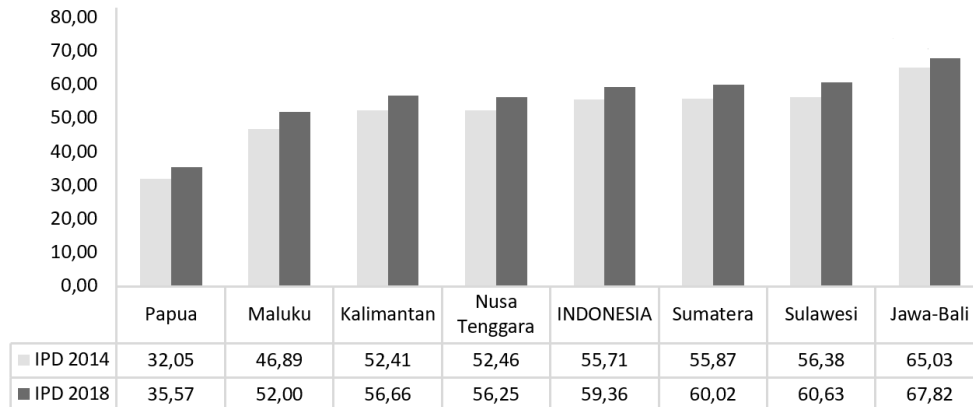
Dimensi penyelenggaraan pemerintah desa mengalami kenaikan paling tinggi di antara dimensi IPD yang lainnya dengan nilai mencapai 9,81 poin. Sementara dimensi pelayanan dasar menjadi dimensi yang kenaikannya paling kecil dengan nilai 0,92 poin. Kemudian untuk IPD secara keseluruhan naik 3,65. Meski kenaikan maksimal masih di bawah 10 poin, hal ini tetap menunjukkan adanya perkembangan antara kedua periode tahun 2014 dengan 2018. Dimensi IPD untuk setiap pulau dapat terlihat pada Gambar 6.

Berdasarkan Gambar 6, dimensi aksesibilitas/transportasi untuk kedua periode merupakan dimensi yang memiliki nilai tertinggi dari dimensi penyusun IPD yang lainnya. Sementara dimensi dengan nilai terendah adalah dimensi kondisi infrastruktur. Hal ini dapat menandakan bahwa perkembangan dimensi kondisi infrastruktur untuk hampir semua pulau di Indonesia masih rendah sehingga dapat berdampak pada rendahnya nilai IPD. Selain itu, berdasarkan metode *Principal Component Analysis (PCA)* oleh BPS, kontribusi dimensi kondisi infrastruktur adalah kedua terbesar setelah dimensi pelayanan dasar. Apabila kedua dimensi tersebut bernilai besar, maka nilai IPD juga akan makin besar.

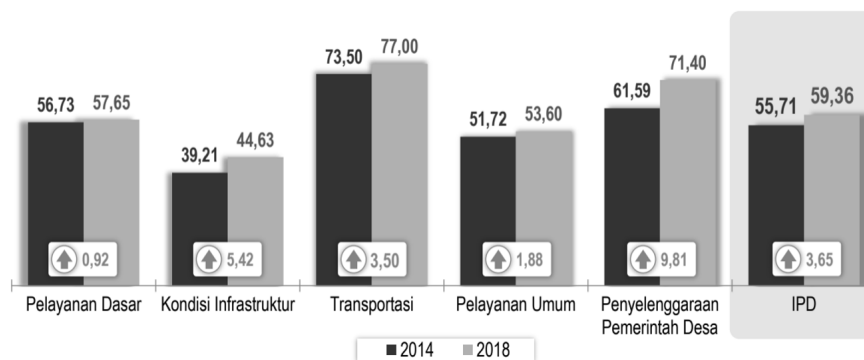
Gambaran Umum Status Desa

Status desa yang akan dibahas pada bagian ini adalah status desa berdasarkan nilai IPD 2014 yang diterbitkan oleh Bappenas dan BPS dan IPD 2018 terbitan BPS. Peta pada Gambar 7 menggambarkan sebaran desa menurut status desa untuk kondisi tahun 2014. Mayoritas kondisi desa di Indonesia berada pada kategori desa berkembang. Wilayah yang masih memiliki banyak desa tertinggal adalah Papua dan Kalimantan.

Tahap perkembangan desa di Indonesia pada tahun 2018 secara nasional berada di kategori de-



Gambar 4. IPD Menurut Pulau Tahun 2014 dan 2018
Sumber: Kementerian PPN/Bappenas & BPS (2015) dan BPS (2019a), diolah



Gambar 5. Perkembangan IPD Menurut Dimensi Penyusun IPD Tahun 2014 dan 2018
Sumber: BPS (2018a)

sa berkembang. Peta persebaran status desa pada Gambar 8 menandakan ada peningkatan antara kondisi tahun 2014 dengan 2018. Hal itu ditandai dengan adanya penurunan jumlah desa tertinggal di beberapa wilayah seperti Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Kemudian ada peningkatan jumlah desa mandiri, terutama di wilayah Jawa-Bali. Meskipun begitu, desa tertinggal masih banyak berada di Papua dan Kalimantan.

Terdapat kemungkinan ketimpangan perkembangan status desa antarpulau yang disebabkan karena realisasi dana desa yang lebih banyak tersebar di wilayah Sumatera dan Jawa-Bali. Jumlah desa mayoritas di dua wilayah tersebut masing-

menyumbang sekitar 30% jumlah desa secara nasional. Secara otomatis, dana desa akan lebih banyak terserap di kedua wilayah tersebut. Penyerapan atas anggaran dana desa yang tidak merata dianggap sebagai salah satu hal yang menyebabkan betapa sulitnya upaya yang diperlukan dalam mengejar ketimpangan antarwilayah (Harmadi *et al.*, 2020b). Harmadi *et al.* (2020a) meneliti tentang kemajuan pembangunan desa apakah hasil dari kinerja pemerintah desa atau dari dampak spasial. Salah satu hasil kajiannya adalah pemusatan pembangunan desa yang dilakukan dengan pengujian autokorelasi spasial. Hasil *spatial clustering* yang diperoleh adalah adanya pola pemusatan pembangunan desa



Gambar 6. Dimensi IPD Menurut Pulau Tahun 2014 dan 2018
 Sumber: Kementerian PPN/Bappenas & BPS (2015) dan BPS (2019a), diolah



Gambar 7. Peta Perkembangan Desa Nasional Tahun 2014
 Sumber: Kementerian PPN/Bappenas & BPS (2015)

berupa adanya wilayah yang mengalami pemusatan tinggi, yaitu wilayah Sumatra, Jawa, Bali, dan bagian barat NTB. Pembangunan desa secara masif masih terjadi di wilayah Indonesia bagian barat. Wilayah tersebut adalah klaster desa dengan desa tetangga yang sama-sama mempunyai skor IPD tinggi. Sementara itu secara statistik, pemusatan pembangunan desa di NTT, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua tidak terjadi secara merata.

Hasil Estimasi Model

Assessment awal diperlukan untuk melihat distribusi dan kecenderungan data serta penaksiran dugaan awal hubungan antara variabel utama dengan variabel terikat dalam penelitian. Berikut ini merupakan *unconditional plot* yang menggambarkan hubungan antara kedua variabel tersebut. Berdasarkan *unconditional plot* pada Gambar 9, dugaan awal dana desa dengan jumlah desa tertinggal memiliki hubungan yang negatif. Sementara itu, dana desa dengan jum-



Gambar 8. Sebaran Desa Menurut Status Desa Tahun 2018
 Sumber: BPS (2018a)

lah desa berkembang dan dana desa dengan jumlah desa mandiri memiliki hubungan yang positif.

Analisis secara ekonomi atas hasil regresi akan dilakukan dengan melihat konsistensi setiap variabel, arti dari koefisien regresi yang dihasilkan, kesesuaian arah parameter dengan hipotesis, dan signifikansi pengaruh perubahan variabel bebas terhadap variabel terikat. Tabel 3 berupa statistik deskriptif yang menggambarkan variabel terikat dan bebas penelitian. Hasil regresi untuk perkembangan ketiga status desa tersaji pada Tabel 4.

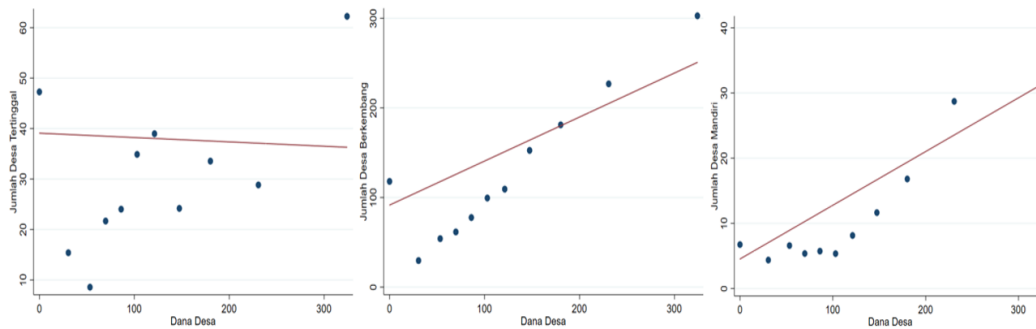
Tabel 4 menyajikan hasil estimasi menggunakan metode OLS, OLS dengan kontrol, *first difference*, dan *first difference* dengan kontrol. Metode *first difference* menunjukkan hubungan yang sesuai dengan dugaan awal, sedangkan metode *first difference* dengan kontrol akan menghasilkan hubungan yang sesuai dengan dugaan awal dan semuanya signifikan.

Perubahan dana desa sebagai variabel utama penelitian berhubungan negatif dengan perubahan jumlah desa tertinggal, seperti terlihat dalam kolom (10). Sementara perubahan dana desa berhubungan positif dengan perubahan jumlah desa berkembang dan desa mandiri, seperti terlihat dalam kolom (11) dan (12). Hubungan perubahan variabel dana desa antarperiode tahun 2014 dengan 2018 terhadap

perubahan jumlah ketiga status desa tersebut signifikan secara statistik pada $\alpha = 1\%$. Hal ini sesuai dengan dugaan awal bahwa dana desa memiliki hubungan yang positif dengan perkembangan status desa. Kenaikan dana desa akan mengakibatkan penurunan jumlah desa tertinggal serta peningkatan jumlah desa berkembang dan desa mandiri. Koefisien konstanta adalah nilai parameter δ_0 yang memperlihatkan perbedaan *output* (perubahan jumlah desa) antara sebelum dan sesudah penggalangan dana desa.

Penggunaan metode *first difference*, dengan efek tetap tambahan berupa *dummy* Pulau-Tahun dan pengujian model regresi berupa pengujian hipotesis, asumsi klasik, *Robustness*, dan *Heterogeneous* dapat menghasilkan gambaran hubungan yang sebagian bersifat kausal. Penggabungan dua kelompok data *cross-sectional* yang dikumpulkan sebelum dan setelah terjadinya suatu kebijakan, dapat digunakan untuk menentukan efeknya secara ekonomi pada *output* atau *outcome* tertentu (Wooldridge, 2016). Hasil regresi dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penggalangan dana desa memiliki dampak secara parsial terhadap perkembangan status desa.

Berdasarkan hasil regresi pada Tabel 4 dapat diperoleh informasi bahwa perubahan variabel utama di dalam penelitian ini (dana desa) memiliki dam-



Gambar 9. Unconditional Plot Dana Desa dengan Jumlah Desa Menurut Status Desa

Tabel 3. Statistik Deskriptif

Variabel	Obs.	Mean	Std. Dev.	Min.	Maks.
Variabel terikat					
Jumlah desa tertinggal dalam suatu kabupaten/kota	858	40,16	67,27	0,00	540,00
Jumlah desa berkembang dalam suatu kabupaten/kota	858	123,20	98,94	0,00	702,00
Jumlah desa mandiri dalam suatu kabupaten/kota	858	9,91	16,49	0,00	122,00
Variabel bebas					
Dana Desa (dalam miliar rupiah)	845	66,94	91,64	0,00	566,95
Alokasi Dana Desa (dalam miliar rupiah)	845	49,49	45,41	0,00	430,77
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (dalam miliar rupiah)	845	4,63	19,86	0,00	389,08
Pendapatan Asli Desa (dalam miliar rupiah)	845	9,10	20,61	0,00	177,70
Bantuan Keuangan (dalam miliar rupiah)	845	19,25	31,00	0,00	316,15
PDRB per kapita atas dasar harga konstan (dalam miliar rupiah)	858	0,03	0,04	0,004	0,39
Jumlah penduduk (dalam ribu jiwa)	858	474,89	587,72	13,50	5.840,91
Jumlah penduduk yang bekerja (dalam ribu jiwa)	839	226,81	263,17	4,79	2.356,88
Deflator PDRB	858	133,05	13,39	80,22	195,17

pak positif secara parsial terhadap perkembangan status desa. Kenaikan dana desa akan berakibat pada penurunan jumlah desa tertinggal, penambahan jumlah desa berkembang, atau penambahan jumlah desa mandiri. Besaran koefisien hasil estimasi signifikan secara statistik pada tingkat $\alpha = 1\%$ untuk ketiga status desa. Setiap kenaikan dana desa sebanyak 1 miliar rupiah dapat berakibat pada penurunan 0,131 jumlah desa tertinggal, atau kenaikan 0,11 jumlah desa berkembang, atau kenaikan 0,022 jumlah desa mandiri. Meskipun terdapat pengaruh yang signifikan secara statistik, *magnitude* besaran koefisien regresi memiliki dampak yang kecil secara ekonomi. Dengan nilai rata-rata dana desa per kabupaten/kota sebesar 66,937 triliun rupiah, terdapat potensi penurunan jumlah desa tertinggal sebesar 21,83%, peningkatan jumlah desa berkembang sebesar 5,98%, dan peningkatan jumlah desa

mandiri sebesar 14,86%.

Koefisien regresi yang diperoleh dapat digunakan untuk mengestimasi biaya dan waktu yang diperlukan untuk memenuhi target RPJMN. Nilai dana desa sebesar 56,562 triliun rupiah (data sampel 2018) dapat berpengaruh pada penurunan 7.410 jumlah desa tertinggal dan kenaikan 1.244 jumlah desa mandiri. Hal ini berarti bahwa dengan dana tersebut, untuk menurunkan 5.000 desa tertinggal diperlukan waktu 0,67 tahun dan untuk meningkatkan 2.000 desa mandiri diperlukan waktu 1,61 tahun. Apabila menggunakan target dana desa tahun 2020, nilai sebesar 72 triliun rupiah dapat berpengaruh pada penurunan 9.432 jumlah desa tertinggal dan kenaikan 1.584 jumlah desa mandiri. Hal ini berarti bahwa dengan dana tersebut, untuk menurunkan 10.000 desa tertinggal diperlukan waktu 1,06 tahun dan untuk meningkatkan 5.000

Tabel 4. Hasil Regresi Dana Desa terhadap Perkembangan Status Desa

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	OLS			OLS dengan kontrol			First Difference			First Difference dengan kontrol		
	Jumlah Desa Berkembang			Jumlah Desa Berkembang			Jumlah Desa Berkembang			Jumlah Desa Berkembang		
	Tertinggal	Mandiri	Tertinggal	Mandiri	Tertinggal	Mandiri	Tertinggal	Mandiri	Tertinggal	Mandiri	Tertinggal	Mandiri
Dana Desa	-0,009 (0,024)	0,491*** (0,033)	0,082*** (0,006)	0,294*** (0,036)	0,771*** (0,043)	0,006 (0,005)	-0,082*** (0,013)	0,02 (0,013)	0,055*** (0,004)	-0,131*** (0,014)	0,110*** (0,013)	0,022*** (0,004)
ADD				0,104 (0,065)	0,172** (0,077)	0,007 (0,009)				-0,018 (0,033)	-0,052* (0,030)	0,035*** (0,010)
BHPRD				0,123 (0,102)	-0,551*** (0,121)	0,031** (0,014)				-0,074 (0,086)	0,062 (0,080)	-0,016 (0,027)
PADES				-0,243** (0,117)	0,488*** (0,140)	0,102*** (0,016)				-0,047 (0,081)	0,092 (0,076)	-0,046* (0,025)
BANKFU				0,299*** (0,080)	0,428*** (0,095)	0,032*** (0,011)				0,052 (0,043)	-0,055 (0,040)	-0,012 (0,013)
PDRB per Kapita				-205,035*** (57,090)	-124,106* (67,922)	8,381 (7,882)				9,9 (197,458)	46,487 (184,103)	0,034 (61,403)
ADHK												
Jumlah penduduk				-0,026 (0,022)	0,014 (0,026)	0,007** (0,003)				0,059* (0,032)	-0,086*** (0,030)	0,038*** (0,010)
Jumlah penduduk bekerja				0,011 (0,053)	0,038 (0,064)	0,023*** (0,007)				0,028 (0,038)	-0,044 (0,036)	0,015 (0,012)
Deflator PDRB				0,074 (0,203)	-0,936*** (0,242)	-0,079*** (0,028)				0,211 (0,171)	-0,259 (0,159)	-0,021 (0,053)
Dummy Pulau-Tahun	No	No	No	Yes	Yes	Yes	No	No	No	Yes	Yes	Yes
Konstanta	39,088*** (2,773)	91,513*** (3,761)	4,531*** (0,629)	62,323** (29,178)	163,151*** (34,715)	8,823** (4,029)	-1,968 (2,094)	7,139*** (2,181)	-1,036 (0,699)	-13,030** (5,979)	17,791*** (5,574)	-1,889 (1,859)
Observasi	845	845	845	826	826	826	416	416	416	399	399	399
F	0,125	219,478	221,016	25,637	67,022	182,122	40,456	2,171	163,502	13,602	19,164	31,368
r ²	0	0,207	0,208	0,413	0,647	0,833	0,089	0,005	0,283	0,348	0,429	0,551
r ² _a	-0,001	0,206	0,207	0,396	0,638	0,828	0,087	0,003	0,281	0,322	0,406	0,534

Keterangan: Standard errors ditunjukkan di dalam kurung

*** signifikan pada taraf 1%;

** signifikan pada taraf 5%;

* signifikan pada taraf 10%.

desa mandiri diperlukan waktu 3,16 tahun. Nilai dana desa yang diperlukan untuk memenuhi target pengurangan 10.000 desa tertinggal adalah 76,335 triliun rupiah dan untuk meningkatkan 5.000 desa mandiri adalah 227,272 triliun rupiah.

Kemudian, perubahan variabel ADD berpengaruh signifikan pada tingkat $\alpha = 1\%$ terhadap perubahan jumlah desa mandiri. Setiap kenaikan ADD sebanyak 1 miliar rupiah dapat berakibat pada kenaikan 0,035 jumlah desa mandiri. Serupa dengan dana desa, meskipun terdapat pengaruh yang signifikan secara statistik, variabel ADD terhadap jumlah desa mandiri, *magnitude* besaran koefisien regresi memiliki dampak yang kecil secara ekonomi.

Perubahan variabel sosial ekonomi berupa jumlah penduduk, signifikan berpengaruh pada tingkat $\alpha = 5\%$ terhadap perubahan jumlah desa tertinggal dan desa berkembang serta signifikan pada $\alpha = 10\%$ terhadap perubahan jumlah desa mandiri. Setiap ada penambahan 1.000 penduduk dapat berakibat pada kenaikan 0,059 jumlah desa tertinggal, penurunan 0,086 jumlah desa berkembang, dan kenaikan 0,038 jumlah desa mandiri. Hubungan positif dengan jumlah desa tertinggal mengindikasikan kemungkinan penambahan jumlah penduduk yang tidak produktif membebani desa sehingga dapat berakibat pada kenaikan desa tertinggal. Sementara untuk hubungan negatif dengan desa berkembang belum tentu buruk karena berdasarkan penelusuran data penurunan jumlah desa berkembang, ternyata sebagian besar desa berkembang naik status ke desa mandiri. Kemudian, untuk hubungan positif dengan desa mandiri, penambahan jumlah penduduk mungkin tidak menjadi masalah karena tidak terlalu membebani kemajuan status desa mandiri sehingga dengan bertambahnya penduduk tetap ada kenaikan jumlah desa mandiri. Secara *magnitude*, besaran koefisien regresi untuk variabel jumlah penduduk juga memiliki dampak yang kecil secara ekonomi.

Fakta menarik dari hasil regresi adalah pada

koefisien konstanta atau nilai parameter δ_0 yang memperlihatkan perbedaan *output* (perubahan jumlah desa) antara sebelum dan sesudah pengguliran program/kebijakan dana desa. Tanpa adanya perubahan variabel bebas apa pun yang digunakan dalam penelitian, pengguliran program dana desa diprediksi secara signifikan dapat menurunkan 13,03 desa tertinggal (taraf $\alpha = 5\%$) dan menaikkan 17,79 desa berkembang (taraf $\alpha = 1\%$). Secara *magnitude*, besaran parameter δ_0 memiliki dampak yang cukup baik secara ekonomi meskipun tidak bisa dikatakan bernilai tinggi.

Selanjutnya, untuk melihat dampak dana desa terhadap perkembangan status desa antara daerah Jawa-Bali dan Non-Jawa-Bali serta karakteristik desa yang ada di kabupaten dan di kota, penulis melakukan regresi dengan membagi sampel sesuai dua kondisi tersebut. Hasil regresinya terdapat pada Tabel 5.

Berdasarkan hasil regresi pada Tabel 5, dapat diperoleh informasi bahwa dana desa dengan jumlah desa tertinggal memiliki hubungan negatif dan signifikan secara statistik pada $\alpha = 5\%$ untuk wilayah Jawa-Bali dan $\alpha = 1\%$ untuk wilayah Non-Jawa-Bali. Hubungan positif signifikan pada $\alpha = 1\%$ dijumpai antara dana desa dengan jumlah desa berkembang di luar Jawa-Bali, sementara untuk wilayah Jawa-Bali negatif dan tidak signifikan. Sebaliknya, hubungan positif signifikan pada $\alpha = 1\%$ dijumpai antara dana desa dengan jumlah desa mandiri di Jawa-Bali. Sementara hubungan antara dana desa dengan jumlah desa mandiri di wilayah luar Jawa-Bali positif tetapi tidak signifikan.

Hal ini menandakan bahwa kenaikan dana desa memiliki korelasi kuat terhadap penurunan jumlah desa tertinggal untuk semua wilayah (Jawa-Bali maupun Non-Jawa-Bali). Korelasi kuat antara kenaikan dana desa dengan kenaikan jumlah desa berkembang dijumpai untuk wilayah Non-Jawa-Bali, sedangkan korelasi kuat antara kenaikan dana desa dengan kenaikan jumlah desa mandiri dijumpai

Tabel 5. Hasil Regresi *First Difference* Sampel Jawa-Bali vs Non-Jawa-Bali

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Desa Tertinggal		Desa Berkembang		Desa Mandiri	
Perubahan Dana Desa	-0,029** (0,011)	-0,198*** (0,035)	-0,022 (0,020)	0,189*** (0,033)	0,052*** (0,017)	0,003 (0,003)
Variabel kontrol keuangan desa	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Variabel kontrol sosial ekonomi	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
<i>Dummy</i> Pulau-Tahun	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Konstanta	-6,466 (5,944)	-6,878 (7,885)	15,523 (11,582)	13,060** (5,984)	-8,726 (7,968)	-0,533 (1,085)
Sampel	Jawa-Bali	Non-Jawa-Bali	Jawa-Bali	Non-Jawa-Bali	Jawa-Bali	Non-Jawa-Bali
Observasi	94	305	94	305	94	305
F	1,824	5,043	4,75	6,579	7,151	17,449
r ²	0,151	0,406	0,249	0,432	0,406	0,399
r ² _a	0,06	0,377	0,169	0,405	0,342	0,37

Keterangan: *Robust Standard errors* ditunjukkan di dalam kurung

*** signifikan pada taraf 1%;

** signifikan pada taraf 5%;

untuk wilayah Jawa-Bali. Hasil regresi ini mendukung peta sebaran perkembangan status desa yang diperoleh dari *Indeks Pembangunan Desa tahun 2014* dan *Hasil Pendataan Potensi Desa tahun 2018* terbitan BPS yang telah dibahas pada bagian sebelumnya.

Hasil regresi untuk sampel Jawa-Bali dan Non-Jawa Bali menyajikan informasi bahwa kenaikan dana desa memiliki dampak secara parsial yang kuat terhadap penurunan jumlah desa tertinggal untuk semua wilayah, baik Jawa-Bali (signifikan pada taraf $\alpha = 5\%$) maupun Non-Jawa-Bali (signifikan pada taraf $\alpha = 1\%$). Setiap kenaikan dana desa sebanyak 1 miliar rupiah dapat berakibat pada penurunan 0,029 jumlah desa tertinggal (wilayah Jawa-Bali) atau penurunan 0,198 jumlah desa tertinggal (wilayah Non-Jawa-Bali). Atas hasil tersebut dapat diketahui bahwa perubahan dana desa berkorelasi lebih kuat dan berdampak lebih besar terhadap perubahan jumlah desa tertinggal di wilayah luar Jawa-Bali. Meskipun begitu, secara *magnitude* besaran koefisien regresi memiliki dampak yang kecil secara ekonomi.

Korelasi kuat antara kenaikan dana desa dengan kenaikan jumlah desa berkembang dijumpai untuk wilayah Non-Jawa-Bali, sedangkan korelasi kuat antara kenaikan dana desa dengan kenaikan jumlah

desa mandiri dijumpai untuk wilayah Jawa-Bali. Setiap kenaikan dana desa sebanyak 1 miliar rupiah dapat berakibat pada kenaikan 0,189 jumlah desa berkembang (wilayah Non-Jawa-Bali) atau kenaikan 0,052 jumlah desa mandiri (wilayah Jawa-Bali). Jadi, perubahan dana desa memiliki dampak yang lebih besar terhadap perubahan jumlah desa berkembang di wilayah luar Jawa-Bali dan perubahan jumlah desa mandiri di wilayah Jawa-Bali. Meskipun begitu, secara *magnitude* besaran nilai koefisien regresi tersebut memiliki dampak yang kecil secara ekonomi.

Berdasarkan hasil regresi dengan pembagian sampel menjadi kabupaten dan kota pada Tabel 6, dapat diperoleh informasi bahwa secara statistik hubungan antara dana desa dengan ketiga status desa di wilayah kabupaten signifikan pada $\alpha = 1\%$. Perubahan dana desa berhubungan negatif dengan perubahan jumlah desa tertinggal dan berhubungan positif dengan perubahan jumlah desa berkembang dan jumlah desa mandiri. Dana desa memiliki dampak yang kuat terhadap perkembangan status desa yang ada di wilayah kabupaten. Sementara untuk dampak dana desa terhadap perkembangan status desa di wilayah kota tidak signifikan. Hal ini cukup logis karena jumlah sampel desa di wilayah kota

Tabel 6. Hasil Regresi *First Difference* Sampel Kabupaten vs Kota

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Desa Tertinggal		Desa Berkembang		Desa Mandiri	
Perubahan Dana Desa	-0,133*** (0,027)	-0,11 (0,193)	0,109*** (0,028)	-0,043 (0,369)	0,022*** (0,006)	0,176 (0,194)
Variabel kontrol keuangan desa	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Variabel kontrol sosial ekonomi	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
<i>Dummy</i> Pulau-Tahun	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Konstanta	25,056** (12,257)	9,571 (17,461)	5,547 (5,277)	-13,575 (25,791)	-3,323** (1,439)	6,791 (9,489)
Sampel	Kabupaten	Kota	Kabupaten	Kota	Kabupaten	Kota
Observasi	380	19	380	19	380	19
F	6,631	.	14,752	.	18,261	.
r ²	0,354	0,595	0,443	0,509	0,557	0,711
r ² _a	0,327	-0,459	0,42	-0,768	0,539	-0,042

Keterangan: *Robust Standard errors* ditunjukkan di dalam kurung

*** signifikan pada taraf 1%;

** signifikan pada taraf 5%;

jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan wilayah kabupaten. Wilayah kota biasanya memiliki kondisi perekonomian dan infrastruktur lebih baik dibandingkan dengan kabupaten sehingga dana desa dapat digunakan secara lebih optimal oleh desa yang berada di wilayah kabupaten.

Hasil regresi untuk sampel kabupaten dan kota menunjukkan dampak secara parsial yang kuat (signifikan pada taraf $\alpha = 1\%$) dana desa terhadap perkembangan status desa yang ada di wilayah kabupaten. Setiap kenaikan dana desa di wilayah kabupaten sebanyak 1 miliar rupiah dapat berakibat pada penurunan 0,133 jumlah desa tertinggal, atau kenaikan 0,109 jumlah desa berkembang, atau kenaikan 0,022 jumlah desa mandiri. Meskipun terdapat pengaruh yang signifikan secara statistik, *magnitude* besaran koefisien regresi tersebut memiliki dampak yang kecil secara ekonomi.

Kesesuaian hasil estimasi dengan dugaan awal terpenuhi untuk dampak secara parsial yang signifikan pada taraf $\alpha = 1\%$ variabel utama, yaitu dana desa terhadap ketiga status desa (desa tertinggal, desa berkembang, desa mandiri). Kemudian untuk parameter δ_0 yang menggambarkan perbedaan *output* antara sebelum dan sesudah penggalangan dana desa, juga telah sesuai dengan hipotesis untuk

pengaruhnya terhadap desa tertinggal dan desa berkembang. Hasil ini sejalan dengan penelitian Maulana & Suryaningrum (2019) yang menyatakan adanya peningkatan signifikan pada IPD Kabupaten Hulu Sungai Tengah antara kondisi sebelum dan setelah bergulirnya dana desa. Hasil estimasi penelitian dengan cakupan sampel 429 kabupaten/kota di Indonesia ini juga mengonfirmasi penelitian Shalsabellah (2020) tentang pengaruh dana desa sebesar 64,4% terhadap peningkatan nilai IPD kabupaten dan kota di Jawa Barat.

Hasil estimasi pada penelitian ini berbeda dengan Yulitasari & Tyas (2020) yang meneliti tentang dana desa, status desa, serta keterkaitan di antara keduanya menurut IDM tahun 2018 dan 2019 Provinsi Jawa Tengah. Hasil penelitian Yulitasari & Tyas (2020) menunjukkan bahwa perubahan besaran dana desa tidak berpengaruh secara signifikan terhadap perubahan status desa di Provinsi Jawa Tengah. Perbedaan hasil penelitian kemungkinan dapat terjadi karena perbedaan indikator yang dipergunakan dalam melihat perkembangan desa, unit analisis, data observasi, dan periode waktu sampel yang dipergunakan di dalam penelitian.

Simpulan

Penelitian ini merupakan studi empiris yang mencoba mendapatkan bukti tentang dampak dana desa terhadap perkembangan status desa per kabupaten/kota di Indonesia. Perkembangan status desa pada tingkat kabupaten/kota dapat dilihat dari penurunan jumlah desa tertinggal, kenaikan jumlah desa berkembang, atau kenaikan jumlah desa mandiri antarperiode penelitian, yaitu antara tahun 2014 dan 2018. Metode estimasi dilakukan melalui regresi PCS menggunakan OLS memakai metode *first difference*, dengan efek tetap tambahan berupa *dummy* Pulau-Tahun. Hasil estimasi menunjukkan variabel utama penelitian (dana desa) berdampak secara parsial signifikan pada tingkat $\alpha + 1\%$ terhadap ketiga status desa (desa tertinggal, desa berkembang, dan desa mandiri). Kenaikan dana desa akan mengakibatkan penurunan jumlah desa tertinggal, penambahan jumlah desa berkembang, atau penambahan jumlah desa mandiri. Tanpa adanya perubahan variabel bebas apa pun yang digunakan dalam penelitian, pengguliran program dana desa diprediksi secara signifikan dapat menurunkan 13,03 desa tertinggal dan menaikkan 17,79 desa berkembang.

Pengujian koefisien determinasi (R^2) mengindikasikan bahwa variabel bebas dalam penelitian mampu menjelaskan variasi status desa sebesar masing-masing 32,20% (desa tertinggal), 40,60% (desa berkembang), dan 53,40% (desa mandiri). Hal ini menandakan variabel dalam model penelitian sebenarnya cukup baik dalam menjelaskan pengaruh antara variabel bebas penelitian dengan perkembangan status desa di Indonesia. Akan tetapi, kemungkinan masih terdapat variabel lain di luar model yang mampu menjelaskan variasi status desa dengan lebih baik. Misalnya seperti dampak spasial berupa *neighborhood effect*, yaitu pembangunan kawasan pedesaan secara bertetangga dan juga kebijakan pemerintah di atas pemerintah desa yang dapat berdampak signifikan bagi kemajuan

pembangunan desa (Harmadi *et al.*, 2020a).

Kenaikan dana desa memiliki dampak secara parsial yang kuat terhadap penurunan jumlah desa tertinggal untuk semua wilayah, baik di Jawa-Bali maupun Non-Jawa-Bali. Oleh karena itu, langkah pemerintah untuk melakukan reformulasi pembagian dana desa dengan memprioritaskan pengalokasian dana desa bagi desa tertinggal, yakni dalam bentuk alokasi afirmasi sudah cukup tepat. Kenaikan dana desa memiliki dampak yang lebih besar terhadap kenaikan jumlah desa berkembang di wilayah luar Jawa-Bali dan kenaikan jumlah desa mandiri di wilayah Jawa-Bali. Hasil regresi untuk sampel kabupaten dan kota menunjukkan dampak secara parsial yang kuat (signifikan pada taraf $\alpha + 1\%$) dana desa terhadap perkembangan status desa yang ada di wilayah kabupaten. Secara keseluruhan, besaran koefisien regresi memiliki dampak yang kecil secara ekonomi meskipun pengaruh dana desa terhadap jumlah desa signifikan secara statistik.

Beberapa saran atas hasil penelitian ini adalah Pemerintah perlu mengkaji kembali formulasi pembagian dana desa yang memberikan bobot alokasi yang besar pada Alokasi Dasar (dibagi secara merata kepada setiap desa). Pengurangan bobot Alokasi Dasar dan penambahan bobot Alokasi Afirmasi nampaknya dapat menghasilkan pembagian dana desa yang lebih wajar. Hal ini mengingat karakteristik desa yang pada dasarnya heterogen dan memiliki sumber pendapatan sendiri dan transfer lain dari kabupaten/kota (ADD) yang bernilai besar secara agregat dan bervariasi antardaerah. Sebagaimana kritik yang dipaparkan oleh Lewis (2015) mengenai fokus dana desa yang dialokasikan per desa tampak tidak tepat dan formula alokasi tidak memperhitungkan pendapatan lain yang dapat diakses oleh desa. Pemerintah dapat mempertimbangkan pembagian dana desa yang lebih besar kepada desa tertinggal dan desa berkembang, sesuai hasil estimasi yang telah dijelaskan sebelumnya sehingga target RPJMN dalam peningkatan status

desa dapat tercapai.

Adapun beberapa keterbatasan penelitian ini antara lain unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah desa yang diagregasi ke dalam level kabupaten/kota sesuai dengan ketersediaan data yang diperoleh dari publikasi BPS. Nilai realisasi dana desa per desa di Indonesia tidak didiseminasikan oleh BPS karena keakurasian data tidak dapat dipastikan dan jika dipakai akan berpotensi menyebabkan kesalahan dalam interpretasi penggunaan datanya. Penulis tidak dapat melakukan penyamaan jumlah desa antara tahun 2014 dan 2018 yang dapat berakibat pada terjadinya bias pemekaran dan penggabungan wilayah. Terdapat tiga kondisi desa di Indonesia terkait hal tersebut, yakni ada penghapusan, pemekaran, ataupun penggabungan wilayah, dengan penggunaan kode dan nama desa yang cukup sulit untuk ditelusuri. Penggunaan data panel dengan jumlah desa yang sama persis antarperiode dapat menggambarkan realitas pembangunan desa yang sesungguhnya, lebih adil, dan layak diperbandingkan. Data sampel penelitian yang digunakan mengecualikan beberapa kabupaten di Sulawesi Tenggara yang mengalami pemekaran di tahun 2014. Pengecualian tersebut dilakukan karena adanya keterbatasan data keuangan desa dan jumlah penduduk bekerja yang tidak tersedia di tahun 2014. Terdapat *missing data* keuangan pemerintah desa dan data jumlah penduduk bekerja pada saat dilakukan regresi sehingga mengurangi jumlah observasi dan dapat berdampak pada hasil estimasi penelitian.

Penelitian ini masih terdapat beberapa kekurangan terkait dengan keterbatasan unit analisis, jumlah observasi, maupun periode observasi penelitian. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah penggunaan data panel dengan jumlah desa yang sama persis antarperiode sehingga dapat menggambarkan realitas perkembangan desa yang sesungguhnya dan perbandingan bisa lebih adil dan layak diperbandingkan. Selain itu, bisa juga mengguna-

kan unit analisis yang lebih kecil pada level desa, penggunaan periode data yang lebih panjang, dan penambahan variabel bebas, seperti beberapa jenis belanja desa yang dapat mencerminkan dana yang riil dibelanjakan untuk keperluan desa. Efek yang sesungguhnya dari dana desa dapat ditangkap dengan baik apabila menggunakan data realisasi dana desa. Sebab penggunaan alokasi dalam mendistribusikan dana desa sebagai acuan *treatment intensity* atau sering juga disebut sebagai *intention to treat effect* belum tentu tersalurkan, terserap, dan terealisasi dengan baik oleh pemerintah desa.

Daftar Pustaka

- [1] Arifin, B., Wicaksono, E., Tenrini, R. H., Wardhana, I. W., Setiawan, H., Damayanty, S. A., ... & Handoko, R. (2020). Village fund, village-owned-enterprises, and employment: Evidence from Indonesia. *Journal of Rural Studies*, 79, 382-394. doi: <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2020.08.052>.
- [2] Azwardi, A., & Sukanto, S. (2014). Efektifitas Alokasi Dana Desa (ADD) dan kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 12(1), 29-41. doi: <https://doi.org/10.29259/jep.v12i1.4865>.
- [3] Bappenas. (2015). *Modul perhitungan Indeks Pembangunan Desa*.
- [4] Boonperm, J., Haughton, J., & Khandker, S. R. (2013). Does the Village Fund matter in Thailand? Evaluating the impact on incomes and spending. *Journal of Asian Economics*, 25, 3-16. doi: <https://doi.org/10.1016/j.asieco.2013.01.001>.
- [5] BPS. (2014). *Statistik Potensi Desa Indonesia 2014*. Badan Pusat Statistik.
- [6] BPS. (2016). *Statistik Keuangan Pemerintah Desa 2015*. Badan Pusat Statistik.
- [7] BPS. (2018a, 10 Desember). Hasil pendataan Potensi Desa (Podes) 2018. *Berita Resmi Statistik*, 99/12/Th. XXI. Badan Pusat Statistik. Diakses 16 Oktober 2020 dari <https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/12/10/1536/hasil-pendataan-potensi-desa--podes--2018.html>.
- [8] BPS. (2018b). *Statistik Potensi Desa Indonesia 2018*. Badan Pusat Statistik.
- [9] BPS. (2019a). *Indeks Pembangunan Desa 2018*. Badan Pusat Statistik.
- [10] BPS. (2019b). *Statistik Keuangan Pemerintah Desa 2019*. Badan Pusat Statistik.
- [11] Harmadi, S. H. B., Suchaini, U., & Adji, A. (2020a). Indikator pembangunan desa di Indonesia: ditinjau dari ketidakseuaian indikator pengukuran pembangunan desa. *TNP2K*

- Working Paper*, 51. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan & Australian Government. Diakses dari 16 Oktober 2020 <https://sonnyharmadi.com/wp-content/uploads/2020/07/WP51IndFA2606.pdf>.
- [12] Harmadi, S. H. B., Suchaini, U., & Adji, A. (2020b). Kemajuan pembangunan desa: kinerja pemerintah desa ataukah dampak spasial?. *TNP2K Working Paper*, 52. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan & Australian Government. Diakses dari 16 Oktober 2020 <https://sonnyharmadi.com/wp-content/uploads/2020/07/WP52INDFinal2606.pdf>.
- [13] Hestiliani, T. (2019). Decentralisatie Wet van Nederland Indies 1903. *ISTORIA: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sejarah*, 15(2), 206-215. doi: <http://dx.doi.org/10.21831/istoria.v15i2.27389>.
- [14] Jhingan, M. L. (2004). *Ekonomi pembangunan dan perencanaan*. Raja Grafindo Persada.
- [15] Kadafi, M., & Sudrahman, H. (2018). Implikasi dana desa yang diterima desa tertinggal per kabupaten/kota terhadap kemiskinan dan angka melek huruf: bukti empiris di Indonesia. *Prosiding SNITT POLTEKBA, Seminar Nasional Inovasi Teknologi Terapan Politeknik Negeri Balikpapan* (), 3(1), 152-159.
- [16] Kartohadikoesoemo, S. (1984). *Desa*. Balai Pustaka.
- [17] Kementerian Keuangan. (2017a). *Buku pintar dana desa: Dana desa untuk kesejahteraan rakyat*. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Diakses 16 Oktober 2020 dari <https://djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2019/10/BUKU-PINTAR-DANA-DESA-15x23-CETAKAN-KE-2.pdf>.
- [18] Kementerian Keuangan. (2017b). *Buku saku dana desa: dana desa untuk kesejahteraan rakyat*. Diakses 13 September 2020 dari https://djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2017/12/Buku-Saku-Dana-Desa-ttd-menteri-final-cover_opt.pdf.
- [19] Kementerian Keuangan. (2019). *Realisasi dana desa, 2015–2019*. Lokadata.id. Diakses 13 September 2020 dari <https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/realisasi-dana-desa-2015-2019-1569484742>.
- [20] Kementerian PPN/Bappenas & BPS. (2015). *Indeks Pembangunan Desa 2014: tantangan pemenuhan standar pelayanan minimum desa*. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional & Badan Pusat Statistik. Diakses 13 September 2020 dari http://bappelitbang.hsu.go.id/web/?wpfb_dl=9.
- [21] Kis-Katos, K., & Sparrow, R. (2015). Poverty, labor markets and trade liberalization in Indonesia. *Journal of development Economics*, 117, 94-106. doi: <https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2015.07.005>.
- [22] Knoema. (2019). Indonesia database for policy and economic research (INDO-DAPOER). Diakses 16 Oktober 2020 dari <https://knoema.com/WBINDDPER2018/indonesia-database-for-policy-and-economic-research-indo-dapoer>.
- [23] Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar ilmu antropologi*. Rineka Cipta.
- [24] KOMPAK. (2017). Village fund and poverty alleviation. *Policy Analysis*. Kementerian PPN/Bappenas & Australian Government. Diakses 13 September 2020 dari <https://sikompak.bappenas.go.id/storage/app/uploads/public/624/f7b/f6a/624f7bf6aa4b0291550362.pdf>.
- [25] Kuncoro, B., Nugraha, J. T., & Dewi, R. (2019). Pengembangan potensi destinasi desa wisata menggunakan Indeks Pembangunan Desa di Balesari Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)*, 7(2), 52-66. doi: <https://doi.org/10.47828/jjanaasian.v7i02.43>.
- [26] Lewis, B. D. (2015). Decentralising to villages in Indonesia: Money (and other) mistakes. *Public Administration and development*, 35(5), 347-359. doi: <https://doi.org/10.1002/pad.1741>.
- [27] Maulana, A., & Suryaningrum, N. (2019). Efektivitas dana desa di kabupaten hulu sungai tengah. *KINERJA: Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 16(2), 139-146. doi: <https://doi.org/10.30872/jkin.v16i2.6171>.
- [28] Riyanto, R., & Junaedi, J. (2017). Implikasi penggunaan dana desa terhadap ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi desa tertinggal di Kabupaten Karanganyar. *Jurnal Sainstech*, 4(2), 01-10.
- [29] Rosen, H. S., & Gayer, T. (2014). *Public finance* (10th Edition). McGraw-Hill.
- [30] Sari, I. M., & Abdullah, M. F. (2017). Analisis ekonomi kebijakan dana desa terhadap kemiskinan desa di Kabupaten Tulungagung. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 15(1), 34-49. doi: <https://doi.org/10.22219/jep.v15i1.4645>.
- [31] Setiawan, A. (2019). Analisis perbedaan tingkat kemiskinan dan ketimpangan perdesaan sebelum dan sesudah digulirkannya dana desa. *Akuntabel*, 16(1), 31-35. doi: <https://doi.org/10.30872/jakt.v16i1.5394>.
- [32] Shalsabellah, G. (2020). *Dampak pengalokasian dana desa dalam pencapaian kinerja Indeks Pembangunan Desa (IPD) di Provinsi Jawa Barat tahun 2015–2018* (Skripsi, Universitas Pendidikan Indonesia).
- [33] Susilowati, N. I., Susilowati, D., & Hadi, S. (2017). Pengaruh alokasi dana desa, dana desa, belanja modal, dan produk domestik regional bruto terhadap kemiskinan kabupaten/kota di Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 1(4), 514-526. doi: <https://doi.org/10.22219/jie.v1i4.6288>.
- [34] Tim Kajian Pusat Kebijakan APBN. (2017). Manfaat dana desa dalam percepatan pembangunan dan pengentasan kemiskinan desa. *Laporan Kajian 2017*. Pusat Kebijakan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu RI. Diakses 13 September 2020 dari <https://fiskal.kemenkeu.go.id/kajian/2018/07/02/>

132003146906279-kajian-manfaat-dana-desa-dalam-percepatan-pembangunan-dan-pengentasan-kemiskinan-desa.

- [35] Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2006). *Pembangunan ekonomi di dunia ketiga* (Edisi 9). Erlangga.
- [36] Wooldridge, J. M. (2016). *Introductory econometrics: A modern approach* (6th Edition). Cengage Learning.
- [37] Yulitasari, Y., & Tyas, W. P. (2020). Dana desa dan status desa di Provinsi Jawa Tengah. *Journal of Regional and Rural Development Planning (Jurnal Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan)*, 4(2), 74-83. doi: <https://doi.org/10.29244/jp2wd.2020.4.2.74-83>.